

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI
BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mengajukan Skripsi
pada Program Studi Administrasi Publik



O L E H

SYAHRUDIN

NPM : 20.22.277

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : SYAHRUDIN

NPM : 2022277

Program Studi : S1 Administarasi Publik

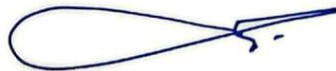
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, 8 April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Agus Sirva Dharma, S.Sos., M.AP
NUPTK. 4142764665137003



Akhmad Berkatillah, S.Sos., M.A.
NUPTK. 0537767668130363



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA". Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Mengajukan Skripsi pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai..

Adapun maksud dan tujuan peneliti dalam menyusun Proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrsi (STIA) Amuntai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti juga mengucapkan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos.,M.A. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat berharga bagi perkembangan akademik mahasiswa.yang tiada henti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan proposal ini.

3. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A. Selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan proposal ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar di STIA Amuntai, khususnya di program studi Administrasi Publik, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan secara tidak langsung selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman dan rekan sejawat, yang telah memberikan dukungan moral, saran, serta diskusi konstruktif sehingga penyusunan proposal ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para dosen penguji maupun pihak lain sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian pada tahap skripsi selanjutnya.

Amuntai, 06 April 2026

Syahrudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	8
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Tipe Penelitian	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Definisi Operasional Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisa Data	37
H. Uji kredibilitas	39

DAFTAR PUSTAKA	41
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	34
Tabel 3. 2 Desain Operational Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Implementasi Kebijakan Model Dye.....	18
Gambar 2.2 Teori Implementasi Kebijakan model Edward III	22
Gambar 2.3 Teori Implementasi Kebijakan Model Mazmanian & Sabatier	25
Gambar 2.4 Teori Implementasi Kebijakan Model Van Metter & Van Horn.....	27
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sampah telah menjadi isu lingkungan global yang sangat mendesak untuk ditangani di abad ke-21. Seiring dengan peningkatan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang masif, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam manajemen limbah padat, di mana kegagalan pengelolaan sampah berdampak langsung pada pencemaran tanah, polusi udara, hingga kerusakan ekosistem perairan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah "Bumi Murakata", telah menetapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini secara filosofis bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

Secara teoretis, implementasi sebuah kebijakan publik seperti Perda Pengelolaan Sampah menuntut adanya keselarasan antara teks aturan dengan fakta di lapangan. Namun, pada kenyataannya, terdapat kesenjangan yang lebar

(policy gap) antara apa yang diamanatkan dalam regulasi dengan realita objektif yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik geografis unik. Salah satu wilayah yang mengalami kendala serius dalam implementasi kebijakan ini adalah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara.

Desa Sungai Buluh merupakan kawasan lahan basah yang pemukimannya berada di atas aliran sungai dan rawa. Kondisi geografis ini seharusnya menuntut standar pengelolaan sampah yang lebih ketat karena limbah domestik yang tidak terkelola akan langsung mencemari sumber daya air. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Sungai Buluh, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2013 belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun fenomena masalah yang ditemukan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut:

Fenomena Masalah:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat di mana warga masih terbiasa membuang sampah sembarangan, terutama langsung ke bawah rumah panggung dan aliran sungai.
2. Belum tersedianya sarana infrastruktur yang diamanatkan regulasi, di mana di Desa Sungai Buluh sama sekali tidak ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai.
3. Belum adanya Program Pembinaan atau aturan Tegas Dari Pemerintah Desa Terkait Sampah.

Fenomena pertama mengenai perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 55 huruf (d) Perda No. 10 Tahun 2013. Kebiasaan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diperparah dengan pandangan masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir yang praktis. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan edukasi dalam kebijakan ini gagal mengubah pola pikir masyarakat (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Fenomena kedua terkait ketiadaan TPS menunjukkan lemahnya variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan. Pasal 9 Perda No. 10 Tahun 2013 secara eksplisit mewajibkan penyediaan sarana prasarana. Tanpa adanya TPS, masyarakat tidak memiliki pilihan logis selain membuang sampah ke media lingkungan. Ketiadaan fasilitas ini menjadi hambatan struktural yang membuat aturan larangan membuang sampah menjadi mustahil untuk dipatuhi secara penuh oleh warga desa (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Fenomena ketiga mengenai nihilnya pembinaan menunjukkan lemahnya aspek disposisi atau komitmen pelaksana di tingkat bawah. Pemerintah Desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), cenderung membiarkan praktik pembuangan sampah sembarangan tanpa adanya upaya edukasi rutin maupun penegakan sanksi yang tegas. Ketidakhadiran negara di tingkat desa dalam isu lingkungan ini menyebabkan aturan hukum kehilangan taringnya (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Ketidaksinkronan ini mengindikasikan adanya kemacetan dalam proses implementasi kebijakan. Mengingat pentingnya menyelamatkan ekosistem

lahan basah di Desa Sungai Buluh dari ancaman limbah plastik dan domestik, maka sangat krusial untuk membedah masalah ini menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan. Peneliti memilih teori George C. Edward III yang menekankan pada aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi untuk menemukan akar penyebab dari kegagalan implementasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan dalam pengelolaan sampah, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam. Fokus penelitian ini diarahkan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara, dengan menggunakan empat variabel teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (dalam Agustino,2020), yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Apa saja Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi

pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

- b) Sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa mengenai pengelolaan sampah atau kebijakan lingkungan di daerah lahan basah/perairan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam memperbaiki strategi agar lebih efektif menjangkau wilayah pedesaan.
- b) Bagi Pemerintah Desa Sungai Buluh, Sebagai saran untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan desa.
- c) Bagi Masyarakat, Sebagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi kesehatan dan keberlangsungan ekosistem sungai
- d) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki variabel penelitian yang serupa. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Nama Peneliti : Daffa Dasni Imani dan Kahar Haerah (2025) Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga lapangan, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi hambatan utama dalam proses implementasi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendukung signifikan berupa partisipasi aktif dari komunitas peduli lingkungan dan forum bank sampah yang membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir volume sampah di tingkat tapak.

2. Nama Peneliti : Afandi, Nasir Mangngasing, dan Nuraisyah (2024) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu (Studi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tondo). Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, Kota Palu, sudah berjalan namun belum maksimal pada beberapa aspek. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian ini meliputi standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sumber daya yang cukup memadai secara kuantitas namun masih terbatas secara kualitas teknis, serta hubungan antar organisasi yang cukup baik. Hambatan utama yang ditemukan adalah karakteristik agen pelaksana yang masih kurang disiplin dalam jadwal pengangkutan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar retribusi sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan lingkungan sosial dan sikap pelaksana menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan beberapa unsur persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu:

1. Persamaan:

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dengan penelitian (Imani & Haerah, 2025) dan (Afandi, dkk., 2024) dalam hal penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk membedah fenomena implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, ketiga penelitian

ini memiliki fokus substansi yang sama, yaitu mengkaji sejauh mana peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dilaksanakan di tingkat daerah maupun unit pemerintahan terkecil (Desa/Kelurahan).

Persamaan khusus dengan penelitian (Imani & Haerah, 2025) terletak pada penggunaan pisau analisis yang sama, yaitu model implementasi kebijakan George C. Edward III yang berfokus pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Perbedaan:

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian (Imani & Haerah, 2025) terletak pada lokus dan karakteristik wilayahnya; di mana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Jember secara makro, sedangkan peneliti berfokus pada Desa Sungai Buluh yang memiliki karakteristik geografis perairan rawa, sehingga tantangan infrastruktur dan pola pembuangan sampahnya jauh lebih spesifik.

Sementara itu, perbedaan dengan penelitian (Afandi, dkk., 2024) terletak pada teori yang digunakan; penelitian tersebut cenderung menggunakan teori implementasi umum terkait standar sasaran dan hubungan antar organisasi, sedangkan peneliti secara konsisten menggunakan model Edward III. Selain itu, pada penelitian (Afandi, dkk., 2024), hambatan yang ditemukan lebih kepada kedisiplinan jadwal angkut dan retribusi di wilayah daratan, sedangkan pada penelitian ini, perbedaan utamanya adalah belum tersedianya sama sekali sarana prasarana pengangkutan sampah di pemukiman atas air serta ketiadaan program pengelolaan sampah di tingkat desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut KBBI, publik adalah: orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Sedangkan kata publik dalam Agustino (2020) mengatakan bahwa:

“Dalam percakapan sehari-hari kata 'publik' mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *public* diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata 'umum' seperti dalam *public telephone* (telepon umum), *public transportation* (transportasi umum), atau public interest (kepentingan umum). Menurut asal katanya (secara etimologis), istilah publik merupakan serapan dari bahasa Inggris *public*, yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (*the public*) yang berarti *the community in general* atau *part of community having a particular interest in common*. Kedua, sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti: *of or concerning people in general* atau *provided, especially by central or local government, for the use of people in general* atau *of or engaged in affairs, entertainment, service, etc. of the people* atau *open or known to people in general*.

Dari pengertian ini, kata 'publik' dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Sementara itu, dilihat dari aspek sejarah perkembangannya, pengertian kata *public* muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari bahasa Yunani, *pubes*, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, *pubes* kemudian diistilahkan menjadi puber– dimengerti sebagai suatu tahapan kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari yang awalnya mementingkan diri sendiri (*self-centered individuals*) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya. Dalam masa ini, seorang individu mulai berminat untuk mengerti kehidupan orang lain atau memahami akibat- akibat dari berbagai tindakan yang dilakukannya (terhadap orang lain atau sebaliknya). Kedua, kata *public* yang juga berasal dari Yunani, *koinon*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *common* yang menekankan

tentang pentingnya suatu hubungan (*relationship*) antar individu. Merujuk pengertian tersebut di atas, kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif”.

Konsep mengenai "publik" menurut pandangan Frederickson dapat ditinjau melalui lima perspektif utama. Pertama, publik dipahami sebagai kelompok kepentingan yang berinteraksi untuk menghasilkan aspirasi masyarakat. Kedua, publik dilihat sebagai kumpulan pemilih rasional yang bergerak demi kepentingan pribadi. Ketiga, publik merupakan representasi kepentingan masyarakat yang disalurkan melalui suara perwakilan. Keempat, publik dipandang sebagai konsumen yang terdiri dari interaksi individu dalam skala luas. Terakhir, publik didefinisikan sebagai warga negara, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi unsur yang paling krusial (Sobirin, 2023).

Sedangkan kebijakan publik menurut KBBI adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Dan menurut Agustino (2020) mengatakan bahwa:

“Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: "... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye 1992: 2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (1992: 2) menulis pula kebijakan publik sebagai:

"Anything a government chooses to do or not to do." Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik”.

Definisi kebijakan publik sering kali dipahami sebagai pilihan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu atau justru tidak melakukannya. Namun, batasan sederhana tersebut terkadang mengabaikan adanya celah antara apa yang direncanakan secara formal dengan apa yang benar-benar dikerjakan di lapangan. Oleh karena itu, sebelum mendalami proses implementasi, sangat penting untuk memahami konsep dasar kebijakan secara utuh, sebagaimana pandangan Friedrich (Syahrudin, 2019).

Kebijakan publik Juga dipahami sebagai sekumpulan keputusan yang saling berkaitan, yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Kebijakan ini merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang dirancang untuk mengarahkan tindakan tertentu di masa depan. Sebagai instrumen yang bersifat mengikat masyarakat luas, kebijakan publik harus disusun oleh pihak-pihak yang memegang otoritas dan mandat resmi dari rakyat. Hal ini penting karena para pembuat kebijakan tersebut bertindak sebagai representasi kepentingan publik dalam menjalankan kewenangannya. menurut Anggara (Dewi, 2022).

b. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Salah satu model proses dan tahapan kebijakan publik adalah model proses. Menurut Agustino (2020) mengatakan bahwa:

“Dalam model pendekatan ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian

kegiatan (yang berproses) yang berujung evaluasi kebijakan publik. Secara singkat model ini hendak menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para aktor kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai”.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara fundamental didefinisikan sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan konkret dari suatu rencana. Dalam konteks tata kelola negara, implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas strategis untuk menjalankan ketetapan yang telah diputuskan. Tahapan ini memegang peranan krusial dalam dinamika pemerintahan, karena menjadi instrumen utama dalam merealisasikan gagasan menjadi hasil nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, para pemangku kebijakan wajib mengaktualisasikan ide-ide melalui langkah operasional di berbagai sektor tanpa pengecualian, yang tentunya memerlukan kesiapan sumber daya di lapangan (Dewi, 2022).

Meskipun sering dianggap sebagai aspek teknis yang kurang signifikan dibandingkan fase formulasi, implementasi sebenarnya menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan. Sebaik apa pun kualitas sebuah kebijakan, ia tidak akan memberikan perubahan transformatif atau nilai fungsional bagi kehidupan sosial jika tidak dieksekusi secara efektif. Tanpa adanya tahap penerapan yang konsisten, kebijakan tersebut hanya akan berakhir sebagai dokumen

administratif yang tidak memiliki pengaruh nyata dalam realitas publik (Dewi, 2022).

1. Definisi Implentasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memastikan tujuan sebuah kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam praktiknya, terdapat dua jalur utama pelaksanaan: melalui eksekusi program secara langsung atau melalui penyusunan kebijakan turunan (derivat). Kebijakan makro seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah umumnya membutuhkan regulasi pelaksana sebagai petunjuk operasional. Sebaliknya, terdapat jenis kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan tanpa memerlukan aturan tambahan, seperti Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, hingga Keputusan Kepala Dinas (Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang terjadi segera setelah sebuah undang-undang disahkan. Secara luas, konsep ini dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan aturan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah fenomena yang kompleks, implementasi dapat ditinjau dari tiga dimensi utama. Pertama, sebagai sebuah proses, implementasi melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan nyata agar mandat dari lembaga legislatif dapat dijalankan. Kedua, dari sisi keluaran (output), implementasi diukur berdasarkan sejauh mana target rencana mendapat dukungan nyata, seperti besarnya alokasi anggaran. Ketiga, pada

tingkat dampak (outcome), implementasi dinilai dari perubahan terukur pada masalah sosial yang disasar. Hal ini mencakup efektivitas kebijakan dalam memberikan rasa aman atau mengurangi kemiskinan dibandingkan kondisi sebelum program tersebut ada. Singkatnya, implementasi mencakup seluruh aktivitas pengelolaan yang melibatkan koordinasi antar aktor dan organisasi guna mewujudkan perubahan nyata di masyarakat. Secara sederhana, implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai tahapan eksekusi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Wirnarno, 2014).

Implementasi kebijakan dapat dipahami juga sebagai upaya nyata dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan serta memperbaiki berbagai hambatan terkait aspek lingkungan, teknologi, sistem kerja, maupun sumber daya manusia. Sebagai sebuah progres organisasi, proses ini dilakukan untuk menyelaraskan operasional sekaligus memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Marcella & Wiley, dalam Kertati dkk., 2023).

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial di mana keputusan politik diubah menjadi aksi nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup langkah operasional yang kompleks, mulai dari perencanaan, pembagian sumber daya, hingga koordinasi dan evaluasi. Keberhasilan tahap ini sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, kapasitas birokrasi, serta dukungan sosial-politik yang ada.

Agar berjalan efektif, implementasi harus memegang beberapa prinsip utama:

- 1) Kesesuaian, yakni penyelarasan program dengan kebutuhan riil masyarakat.
- 2) Kolaborasi, melalui kerja sama antar pemangku kepentingan.
- 3) Partisipasi Publik, dengan melibatkan warga guna memperkuat legitimasi.
- 4) Sinergi, untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
- 5) Kapasitas Institusional, yang memastikan lembaga pelaksana memiliki keahlian dan sumber daya manusia yang mumpuni (Arafat, 2023).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Agustino (2020) mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Merujuk pada sejarah perkembangan studi kebijakan, implementasi kebijakan publik yang saat ini kita pelajari merupakan generasi ketiga (Lester & Stewart Jr. 2000; Pölzl & Treib 2007). Generasi pertama berkembang pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, di mana model implementasi kebijakan yang dikembangkan adalah top-down theories (disebut juga top-downers atau forward-mapping). Sementara generasi kedua berkembang antara tahun 1980-an hingga 1985 yang mengembangkan bottom-up theories (bottom-uppers atau backward-mapping) dan generasi ketiga tumbuh mulai tahun 1985-an hingga sekarang dengan hybrid theories-nya. Setiap teori tentu saja ada banyak scholars yang mengembangkannya; misalnya, teori top-down dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Wildavsky, van Meter & van Horn, Mazmanian & Sabatier, dan lainnya. Manakala teori bottom-up

dikembangkan oleh Lipsky, Elmore, Hjern, dan lainnya; sedangkan teori generasi ketiga (teori hibrid) dikembangkan oleh Goggin, Ripley & Franklin, Winter, dan lainnya.

Makna implementasi kebijakan pada dasarnya mengacu pada proses untuk memahami secara mendalam mengenai apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program atau kebijakan secara resmi ditetapkan dan diberlakukan. Dalam hal ini, implementasi tidak hanya dipahami sebagai tahap pelaksanaan semata, tetapi juga mencakup keseluruhan dinamika yang muncul setelah kebijakan tersebut disahkan. Fokus utama implementasi kebijakan terletak pada berbagai aktivitas, tindakan, serta peristiwa yang berkembang sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan juga berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menjalankan kebijakan, termasuk proses pengorganisasian, pengelolaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Di samping itu, implementasi juga menitikberatkan pada sejauh mana kebijakan mampu memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, baik dalam bentuk perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan, maupun munculnya berbagai konsekuensi lain di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga pada hasil dan dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut dijalankan (Anggara dalam Kendi, 2024).

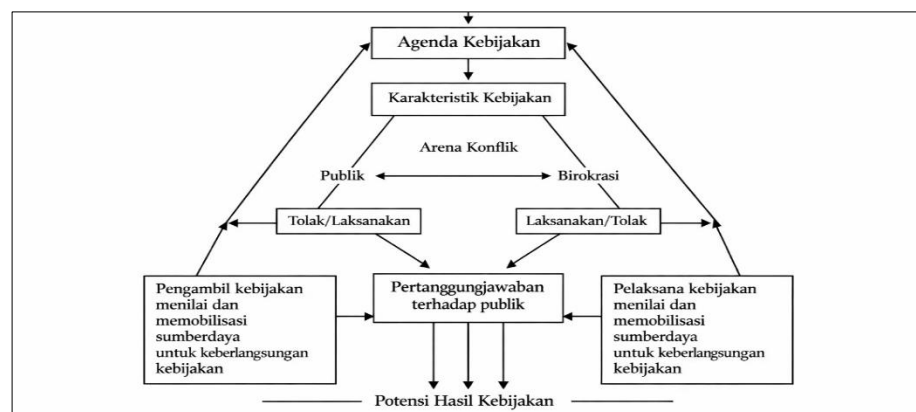
Ada berbagai Teori Berlaku sampai Sesekarang, diantaranya teori implementasi kebijakan publik model Dye, model Charles O. Jones, model George C. Edward III, Model Van Metter & Van Horn. dan model Mazmanian & Paul A. Sabatier.

b. Teori Implementasi Kebijakan Model Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan interaktif memandang pelaksanaan program sebagai proses dinamis yang terus berkembang. Berbeda dengan pendekatan kaku, model ini memungkinkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengusulkan perubahan di setiap tahapan jika hasil di lapangan belum sesuai harapan. Melalui evaluasi berkelanjutan di setiap fase, kelemahan kebijakan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki guna memastikan tujuan akhir tercapai secara efektif (Agustino, 2020).

Gambar 2.1

Teori Implementasi Kebijakan Model Dye



Sumber : Dye (dalam Agustino, 2020)

Menurut Dye (dalam Agustino, 2020) menekankan bahwa meskipun ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam implementasi kebijakan, hal tersebut bukan merupakan jaminan

keberhasilan program. Sumber daya hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila terdapat interaksi yang positif dan dinamis antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, serta masyarakat sebagai pengguna kebijakan dalam lingkungan yang kondusif. Jika model interaktif ini dibandingkan dengan model proses politik dan administrasi dari Merilee S. Grindle, terdapat keselarasan elemen yang cukup signifikan. Menurut Grindle, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh fase pengambilan keputusan yang mencakup penetapan tujuan, program aksi, serta rancangan pendanaan yang jelas. Dalam model linier, fase ini dianggap sebagai tahapan yang paling krusial. Lebih lanjut, Grindle mengidentifikasi enam elemen isi kebijakan (*content of policy*) dan tiga elemen konteks implementasi (*context of implementation*) sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan aktivitas di lapangan. Karakteristik ini menunjukkan adanya kemiripan dengan model interaktif, di mana terjadi hubungan timbal balik antara aktor pengambil keputusan, pelaksana, dan kelompok sasaran. Istilah model proses politik dan administrasi yang diusung Grindle tidak hanya menunjukkan kedekatannya dengan model interaktif, tetapi juga memperlihatkan keunggulan model tersebut dalam mengukur keberhasilan implementasi melalui pencapaian output serta outcomes yang dihasilkan.

c. Teori Implementasi Kebijakan Model Charles O. Jones

(dalam Agustino, 2020) memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai bagaimana sebuah kebijakan

ditransformasikan ke dalam tindakan nyata. Jones (1996) menekankan bahwa implementasi bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang statis, melainkan sebuah proses sistematis yang menuntut perhatian mendalam pada tiga aktivitas krusial agar program yang direncanakan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan. Ketiga pilar utama tersebut adalah:

1. Pengorganisasian (*Organization*)

Aktivitas pengorganisasian dipahami sebagai upaya strategis dalam menata kembali atau menetapkan struktur sumber daya, unit-unit pelaksana, serta metode kerja di lapangan. Fokus utama dalam tahap ini adalah menciptakan wadah operasional yang solid. Melalui pengorganisasian yang tepat, segala bentuk modal—baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur—diarahkan secara sinkron untuk merealisasikan sasaran kebijakan. Tanpa struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas, kebijakan hanya akan berhenti sebagai rencana di atas kertas tanpa adanya mesin penggerak yang mampu menghasilkan *output* konkret.

2. Interpretasi (*Interpretation*)

Aspek kedua yang tidak kalah penting adalah interpretasi, yaitu proses penerjemahan substansi kebijakan yang sering kali bersifat normatif dan abstrak ke dalam bahasa yang lebih operasional. Tahapan ini sangat vital karena para pelaksana di tingkat lapangan memerlukan instruksi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterima secara logis. Dengan interpretasi yang akurat, potensi terjadinya ambiguitas atau salah tafsir terhadap maksud pembuat kebijakan dapat diminimalisir. Hal ini memastikan bahwa seluruh pelaku kebijakan, termasuk kelompok sasaran, memiliki pemahaman yang seragam sehingga proses eksekusi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penerapan/Aplikasi (*Application*)

Pilar terakhir dalam model Jones adalah penerapan atau aplikasi, yang merujuk pada penyediaan layanan, distribusi bantuan, atau pelaksanaan rutinitas administratif secara berkelanjutan. Tahapan ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara bagi masyarakat melalui program-program yang telah dicanangkan. Aplikasi mencakup segala bentuk tindakan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan target sasaran. Keberhasilan pada tahap ini menjadi tolok ukur utama apakah sebuah kebijakan telah berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan publik atau manfaat ekonomi sesuai dengan rencana operasional.

Berdasarkan pemikiran Jones (dalam Agustino, 2020) tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah rangkaian tindakan yang luas dan berkesinambungan. Keberhasilan suatu program pemerintah sangat bergantung pada bagaimana otoritas publik mampu mengintegrasikan fungsi manajerial melalui pengorganisasian, fungsi komunikasi melalui interpretasi yang tepat, serta fungsi pelayanan melalui aplikasi yang konsisten di tengah masyarakat.

d. Teori model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III

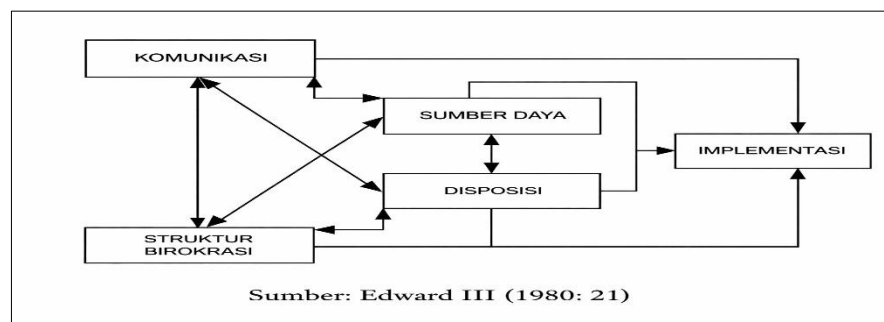
(dalam Agustino, 2020) mengemukakan bahwa keberhasilan atau kinerja suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama yang saling berinteraksi. Kerangka teori ini memberikan panduan komprehensif bagi para pelaksana kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian tujuan program. Keempat variabel tersebut meliputi:

1. Komunikasi menjadi fondasi utama dalam penyampaian pesan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Terdapat tiga dimensi penting dalam variabel ini:
 - 1) Transmisi: Informasi harus disalurkan dengan baik guna menghindari distorsi atau salah pengertian akibat panjangnya rantai birokrasi. Penyampaian yang berlapis berpotensi membiaskan makna asli kebijakan di tengah jalan.
 - 2) Kejelasan: Instruksi yang diterima oleh birokrat tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) harus bersifat eksplisit dan tidak ambigu. Kejelasan informasi memastikan pelaksana memahami konten kebijakan sehingga tujuan dapat diraih secara akurat.
 - 3) Konsistensi: Perintah pelaksanaan harus bersifat tetap. Instruksi yang kerap berubah akan memicu kebingungan bagi pelaksana lapangan dan menghambat ritme kerja.
2. Sumber Daya Sekalipun komunikasi berjalan lancar, implementasi akan gagal tanpa dukungan sumber daya yang memadai, yang mencakup:
 - 1) Staf (Sumber Daya Manusia): Kuantitas staf tidaklah cukup; diperlukan kualitas berupa kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan kebijakan. Informasi:

- 2) Implementor memerlukan dua jenis informasi, yakni petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan serta data mengenai kepatuhan aktor-aktor lain terhadap regulasi yang berlaku.
 - 3) Wewenang: Otoritas formal diperlukan agar perintah memiliki legitimasi di mata publik. Namun, wewenang ini harus dikelola secara etis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
 - 4) Fasilitas: Ketersediaan sarana dan prasarana fisik merupakan prasyarat mutlak agar staf dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
3. Disposisi Disposisi merujuk pada sikap, kecenderungan, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Unsur-unsur di dalamnya meliputi:
- 1) Efek Disposisi: Sikap penolakan dari personel dapat menjadi hambatan nyata. Oleh sebab itu, diperlukan staf yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kepentingan publik.
 - 2) Pengaturan Birokrasi (*Staffing*): Penempatan personel harus didasarkan pada kompetensi melalui sistem penilaian kinerja dan pelayanan publik yang optimal.
 - 3) Insentif: Edward III menyarankan manipulasi insentif sebagai teknik pendorong. Dengan memberikan keuntungan tambahan atau konsekuensi tertentu, pelaksana akan lebih termotivasi untuk bekerja sesuai dengan kepentingan organisasi dan tujuan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang mendukung sangat menentukan kelancaran implementasi melalui dua cara:
- 1) SOP (*Standard Operating Procedures*) yang Fleksibel: Keberadaan prosedur tetap yang rutin sangat membantu efisiensi kerja harian, namun prosedur tersebut harus tetap fleksibel agar dapat merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis.
 - 2) Fragmentasi: Pembagian tanggung jawab atau penyebaran aktivitas kepada unit-unit kerja yang spesifik dan kompeten bertujuan agar implementasi berjalan lebih efektif dan fokus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Gambar 2.2

Teori Implementasi Kebijakan Model Edward III



Sumber : Edward III (dalam Agustino,2020)

e. Teori implementasi kebijakan Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier.

(dalam Agustino, 2020) Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikenal dengan istilah A Framework for Policy Implementation Analysis. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan formal kebijakan sepanjang proses pelaksanaannya. Variabel-variabel tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

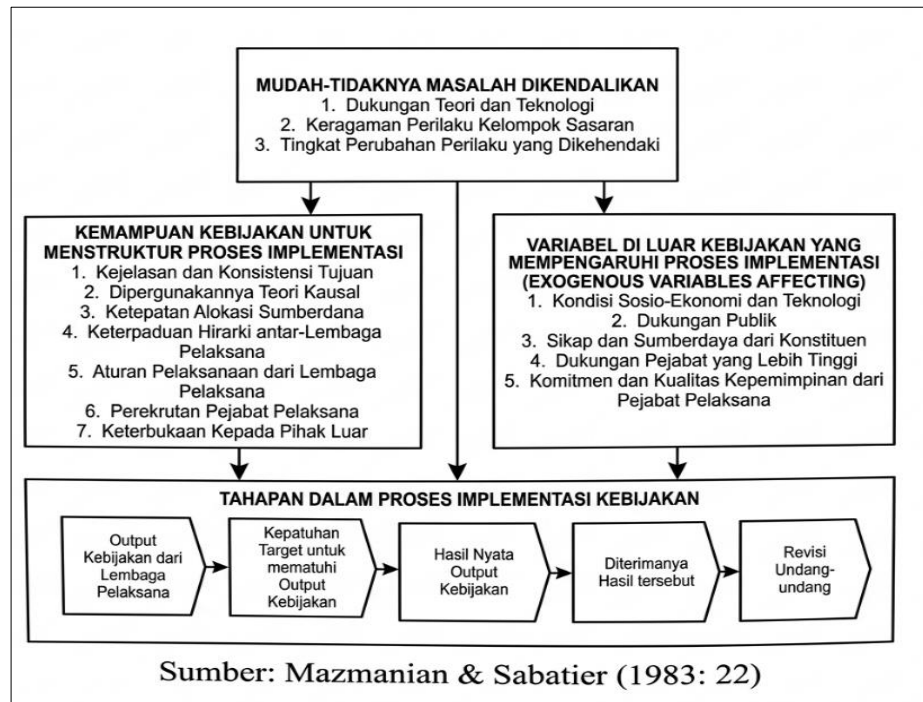
1. Karakteristik Masalah yang Dihadapi Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemudahan atau kesulitan masalah yang akan ditangani, yang meliputi:
 - a) Tingkat Kesulitan Teknis Pencapaian tujuan kebijakan bergantung pada berbagai persyaratan teknis, seperti kemampuan dalam menyusun indikator kinerja yang efektif namun tidak memerlukan biaya besar, serta pemahaman yang memadai mengenai hubungan sebab-akibat dari suatu masalah. Selain itu, keberadaan dan penguasaan teknik tertentu juga turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi.
 - b) Keragaman Perilaku yang Diatur Semakin beragam perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, maka semakin kompleks pula bentuk pelayanan yang harus diberikan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya merumuskan aturan yang tegas dan jelas, sehingga aparat pelaksana di lapangan memerlukan pengawasan yang lebih ketat dalam menjalankan kebijakan.
 - c) Cakupan Kelompok Sasaran Semakin kecil dan spesifik kelompok sasaran kebijakan, maka semakin mudah untuk memperoleh dukungan politik serta memobilisasi sumber daya. Hal ini akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - d) Tingkat Perubahan Perilaku yang Diinginkan Kebijakan yang menuntut perubahan perilaku dalam skala besar cenderung lebih sulit untuk diimplementasikan. Sebaliknya, perubahan yang bersifat terbatas dan terfokus akan lebih mudah dikendalikan dan dicapai oleh para pelaksana kebijakan.
2. Kemampuan Kebijakan dalam Menstruktur Proses Implementasi Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh sejauh mana kebijakan mampu mengatur dan mengarahkan proses pelaksanaannya secara tepat, melalui:

- a) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan Peraturan yang disusun secara jelas dan sistematis, serta memiliki skala prioritas yang tegas, akan memudahkan para pelaksana dalam memahami arah kebijakan, sehingga output yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
 - b) Ketepatan Teori Kausalitas Kebijakan perlu didukung oleh teori kausal yang jelas mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai, sehingga proses implementasi memiliki dasar yang logis dan terarah.
 - c) Kecukupan Sumber Daya Keuangan Ketersediaan dana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, tujuan kebijakan akan sulit direalisasikan secara optimal.
 - d) Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga Kebijakan yang baik harus mampu menciptakan keterpaduan antar lembaga pelaksana. Kurangnya koordinasi antar instansi justru dapat menghambat bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan.
 - e) Aturan Pengambilan Keputusan Adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi pelaksana akan membantu menciptakan konsistensi, mengurangi konflik, serta memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan.
 - f) Komitmen Aparatur Pelaksana Kesepahaman dan komitmen para pejabat pelaksana terhadap tujuan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini penting karena kebijakan yang bersifat top-down seringkali menghadapi kendala dalam penerapannya di tingkat lokal. g. Keterlibatan Pihak Eksternal Peluang partisipasi dari pihak luar, seperti masyarakat atau organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat pengawasan serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara lebih efektif.
3. Faktor Eksternal di Luar Kebijakan Selain faktor internal kebijakan, terdapat pula variabel eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:
- a) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangan teknologi antar wilayah dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, faktor lingkungan eksternal perlu dipertimbangkan secara serius.
 - b) Dukungan Masyarakat Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tingkat dukungan publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan implementasi di lapangan.
 - c) Sikap dan Sumber Daya Masyarakat Keberhasilan perubahan yang diharapkan dari kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat serta sumber daya yang dimiliki. Nilai-nilai lokal atau kearifan lokal dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat implementasi.
 - d) Kepemimpinan dan Kapasitas Aparatur Kemampuan serta komitmen para pemimpin dan pelaksana kebijakan dalam

mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi secara keseluruhan.

Gambar 2.3

Teori Implementasi Kebijakan Model Mazmanian & Sabatier.



Sumber Model Mazmanian & Sabatier. (dalam Agustino,2020)

- f. Teori Model implementasi kebijakan menurut Donald van Metter & Carl van Horn.

(dalam Agustino, 2020) dikenal dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Model ini memandang implementasi sebagai sebuah proses linier yang bergerak dari keputusan politik menuju kinerja kebijakan. Keberhasilan implementasi dianggap sebagai sebuah performansi atau pencapaian dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara sengaja untuk meraih hasil maksimal melalui interaksi berbagai variabel. Van Meter dan Van Horn merumuskan enam variabel utama

yang menjadi determinan kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan hanya dapat diukur secara efektif apabila standar ukuran dan tujuannya bersifat realistis serta selaras dengan kondisi sosio-kultural di tingkat pelaksana. Kebijakan yang memiliki target terlalu idealistik atau utopis tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan akan menghadapi hambatan besar dalam proses aktualisasinya, sehingga sulit mencapai titik keberhasilan yang diharapkan.

2. Sumber Daya Efektivitas implementasi sangat bergantung pada optimalisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen paling krusial; diperlukan aparatur yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas kompetensi dan kapabilitas yang relevan dengan tuntutan kebijakan. Selain SDM, dukungan sumber daya finansial (anggaran) dan ketersediaan waktu juga menjadi faktor penentu. Ketersediaan staf yang kompeten tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai akan menciptakan kendala operasional yang serius.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel ini merujuk pada struktur organisasi, norma-norma, serta pola hubungan yang terbentuk di dalam instansi yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Karakteristik birokrasi, termasuk tingkat hierarki dan prosedur kerja, sangat memengaruhi cara agen tersebut merespons instruksi kebijakan.

4. Kecenderungan (Disposisi) Pelaksana

Sikap dan komitmen para implementor terhadap tujuan kebijakan sangat menentukan kelancaran proses di lapangan. Dukungan atau penolakan dari para pelaksana terhadap substansi kebijakan akan berdampak langsung pada intensitas dan kualitas kinerja yang dihasilkan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan syarat mutlak dalam manajemen implementasi. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan sinkronisasi di antara berbagai lembaga atau pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif berfungsi untuk meminimalisir kesalahan interpretasi dan tumpang tindih kewenangan, sehingga aktivitas pelaksana dapat berjalan secara terpadu.

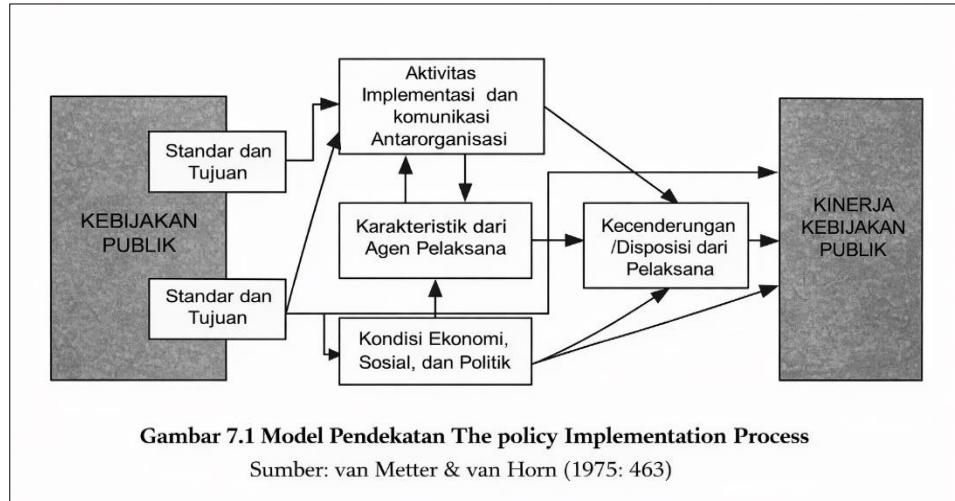
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor terakhir yang memengaruhi kinerja implementasi adalah kondisi lingkungan eksternal. Dukungan dari lingkungan ekonomi yang stabil, struktur sosial yang kooperatif, serta iklim politik yang kondusif menjadi pendorong utama keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi

penyebab utama kegagalan implementasi meskipun variabel internal lainnya telah terpenuhi.

Gambar 2.4

Teori Implementasi Kebijakan Model Van Metter & Van Horn



Sumber Model Van Metter & Van Horn (dalam Agustino,2020)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut adalah poin-poin krusial dalam Perda tersebut:

a. Asas dan Tujuan (Pasal 3 & 4)

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Desa (Pasal 8)

Perda ini memberikan mandat khusus kepada tingkat desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (5): "Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya." Pembinaan ini mencakup kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

c. Kewajiban Sarana Prasarana (Pasal 9)

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b, yaitu menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara (TPS) di tepi jalan umum atau di area pemukiman yang telah ditentukan.

d. Tahapan Penanganan Sampah (Pasal 15)

Penanganan sampah dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang meliputi:

- 1) Pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- 2) Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- 3) Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

e. Larangan dan Sanksi (Pasal 55 & 58)

Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan, termasuk larangan membuang sampah ke sungai atau saluran air (Pasal 55 huruf d). Pelanggaran terhadap larangan membuang sampah di sungai diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda maksimal Rp100.000,00 (Pasal 58 ayat 3).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran peneliti dalam memecahkan masalah penelitian yang didasarkan pada landasan teoretis yang relevan. Dalam penelitian ini, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara .

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang krusial karena sebuah kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memiliki makna jika tidak dilaksanakan secara efektif di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III sebagai landasan teoretis untuk membedah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh. Menurut Edward III, terdapat empat variabel utama yang saling berhubungan dan menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

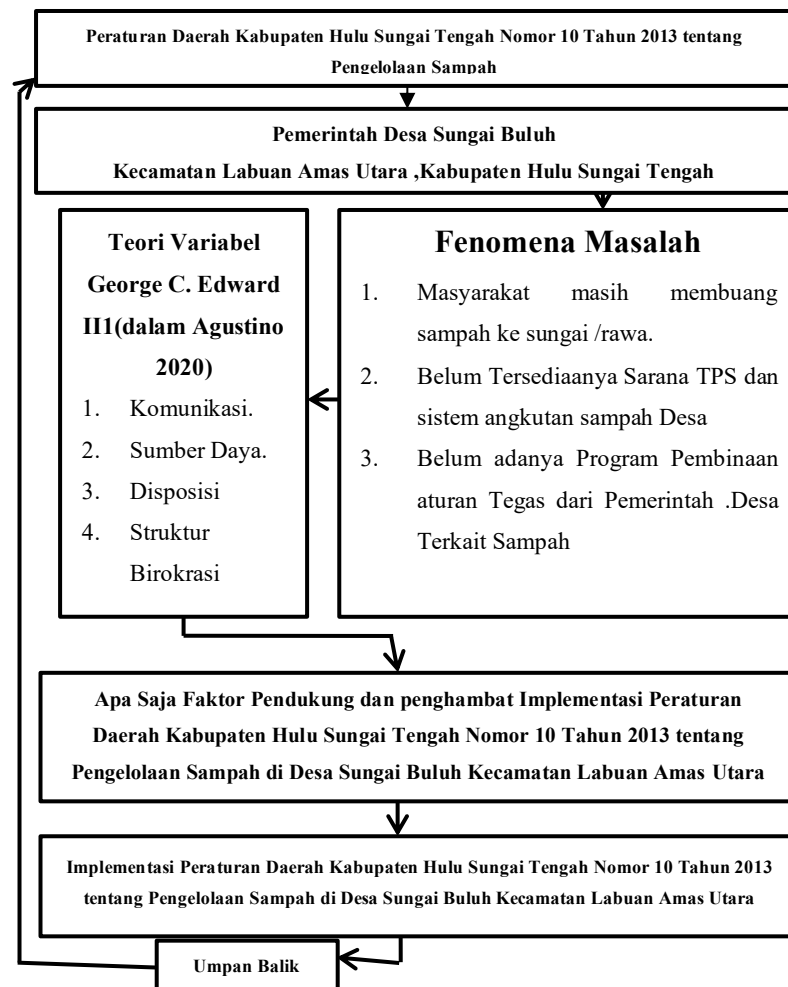
1. Komunikasi, yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut disampaikan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Hambatan sering terjadi apabila informasi mengenai aturan pengelolaan sampah tidak tersalurkan dengan jelas, tidak konsisten, atau tidak sampai kepada masyarakat di Desa Sungai Buluh.
2. Sumber Daya, yang mencakup ketersediaan staf yang kompeten, sarana prasarana seperti tempat pembuangan sampah, hingga dukungan anggaran. Keterbatasan sumber daya, baik fisik maupun finansial, merupakan faktor penghambat yang signifikan dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah perairan.
3. Disposisi, yaitu kecenderungan, sikap, atau komitmen dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaksana kebijakan atau pemerintah desa memiliki komitmen yang rendah terhadap isu lingkungan, maka implementasi Perda tersebut akan terhambat meskipun aturan hukumnya sudah ada.

4. Keempat adalah Struktur Birokrasi, yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab antar instansi. Struktur birokrasi yang terlalu rumit atau kurangnya koordinasi antar lini seringkali menjadi penghambat dalam eksekusi program pengelolaan sampah di tingkat desa.

Melalui keempat variabel tersebut, peneliti akan menganalisis fenomena yang terjadi di Desa Sungai Buluh untuk menemukan akar penyebab mengapa pengelolaan sampah belum berjalan sama sekali di sana. Dengan mengidentifikasi hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka akan ditemukan jawaban mengenai faktor-faktor

Adapun alur pemikiran tersebut dapat divisualisasikan melalui Gambar sebagai berikut

Gambar 2. 5
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penentuan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah Desa Sungai Buluh yang memiliki luas 18,52 Km² dengan kondisi geografis berupa lahan rawa (dataran rendah dengan ketinggian $\pm$ 4 meter dari permukaan laut). Kondisi ini menyebabkan Desa Sungai Buluh memiliki tantangan spesifik dalam pengelolaan sampah di permukiman atas air.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Moleong dalam Abdul F. Nasution (2023:34) Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek Penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan subjek pada kondisi lingkungan aslinya untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi secara mendalam. Dalam prosesnya, penelitian ini tidak hanya bergantung pada satu teknik, melainkan mengintegrasikan berbagai

metode penelitian yang relevan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dari sudut pandang alamiah Menurut Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan (2018)

C. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Arikunto dalam Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018:84) menyebutkan Penelitian deskriptif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat Penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.

Penelitian deskriptif merupakan metode yang berfokus pada penyajian gambaran komprehensif mengenai suatu latar sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi serta memperjelas fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan berbagai variabel yang relevan dengan unit atau masalah yang tengah dikaji (Roosinda dkk., 2021).

Mayer dan Greenwood dalam Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018:85) menjelaskan tipe Penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, tipe Penelitian deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, hasil observasi dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Jadi, dalam penelitian ini sumber data yang utama adalah informan (manusia), yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat informan kunci.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2020:289).

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai informasi yang objektif dari pendapat, pengalaman maupun hubungannya dengan pelaksanaan

Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari pihak birokrasi selaku pelaksana kebijakan (implementor) dan masyarakat selaku kelompok sasaran (target group). Peneliti menetapkan informan dari unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 3 orang, unsur pemerintah kecamatan Labuan Amas Utara 1 orang , unsur Pemerintah Desa Sungai Buluh sebanyak 3 orang, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 1 orang, unsur tokoh masyarakat sebanyak 1 orang, dan unsur masyarakat umum sebanyak 4 orang jadi total 13 informan. Berikut merupakan tabel informan penelitian yaitu:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas	1
2.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan	1
3.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	1
4.	Kasi Trantib & Linmas	1
5.	Pembakal (Kepala Desa) Sungai Buluh	1

No	Informan Penelitian	Jumlah
6.	Sekretaris Desa	1
7.	Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan	1
8.	ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
9.	Ketua RT / Tokoh Masyarakat	1
10.	Warga Masyarakat Desa	4
11.	Total	13

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Desain operasional dalam variabel penelitian juga suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun desain operasional penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operational Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
George C. Edward III(dalam Agustino 2020)	1. Komunikasi	a. Tranmisi. (penyampaian) b. Kejelasan.

Variabel	Sub Variabel	Indikator
	2. Sumber Daya	a. Fasilitas. b. Anggaran
	3. Disposisi	a. Efek instruksi (pemahaman) b. Respon Pelaksana c. Intensitas (komitmen)
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP(Mekanisme) b. Fragmentasi(Koordinasi)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Zuchri Abdussamad, 2021:147).

Pengamatan langsung (observasi) yaitu teknik pengumpulan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek Penelitian. Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan dalam meneliti sejalan dengan pertanyaan Penelitian dan bermaksud untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan aspek-aspek perbandingan dalam penelitian ini.

2. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2020:304).

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dengan melakukan tanggung jawab dengan baik yang ada hubungan nya dengan pembahasan ini. Wawancara dilakukan secara berstruktur.

3. Dokumentasi

Arikunto dalam Zuchri Abdussamad (2021:150) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan focus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.

Dokumen adalah kumpulan dari dokumen - dokumen yang dapat memberi keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses Pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar meluas kepada pemakai informasi tersebut.

G. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman dalam Zuchri Abdussamad (2021:160-162) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji kredibilitas

Menurut Lapau dalam Agus R. Kumara (2018:51-52) uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Kredibilitas kesesuaian antara konsep peneliti dan konsep informan agar kredibilitas terpenuhi, maka hal yang dilakukan dalam uji kredibilas ini yaitu:

1. Waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama

Peneliti harus yakin selagi penelitian belum cukup meyakinkan, maka peneliti perlu melakukan perpanjangan waktu penelitiannya sambil mengkaji kembali, menelisisk, dan menganalisis data yang telah terkumpul.

2. Ketekunan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data.

3. Mengadakan triangulasi

Menurut Lapau, triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

4. Menganalisis kasus *negative*

Menganalisis kasus *negative* dilakukan dengan menemukan terlebih dahulu data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya.

5. Menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data
6. Menggunakan *member check*

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, melakukan pengkategorian, dan penarikan kesimpulan dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain dalam kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afandi, A., Mangngasing, N., & Nuraisyah, N. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU (STUDI PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TONDO). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 769-781.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi ke-2) ALFABETA, cv.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Arafat. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Litrus.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Imani, D. D., & Haerah, K. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 55-63.
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi kebijakan publik: Aktor, perangkat, manajemen, dan isu-isu otonomi khusus Papua*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kertati, I., dkk.(2023). *Implementasi kebijakan publik (Dari hulu ke hilir)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kumara, Agus Ria. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2013, Juli). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/24820>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Roosinda, F. W., dkk.(2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sobirin, S. (2023). *Implementasi kebijakan (studi kasus, teori, dan aplikasinya)*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori dan studi kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zellatifanny, Cut Medika dan Mudjiyanto, Bambang. 2018. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi”. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*. Vol. 1, No. 2, hlm 83-90.